

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2015). *Hukum Perdata*. Universitas Terbuka.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asyhadie, Z., Rahman, A., & Mualifah. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Rajagravindo Persada.
- Jamba, P. (2014). Analisis Penerapan Delik Aduaan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693, 3(1), 33. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/957>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mitrano, F. (2020). *Tanggungjawab Pihak Pengembang Perumahan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan Konsumen di Kota Pekanbaru*. 29–50.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
- Pramudiyana, A. D. dan N. H. (2019). *Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan* (Vol. 4, Issue 1).
- Pratama, A. R. (2013). *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Tangerang Selatan*. 12.
- Prestiana, Y. O. (2013). *Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan*

- Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. *Calyptra*, 2(1), 1–12.
- Respaty, V. J. (2013). *Hukum Tata Negara*. CV. Mustika Khatulistiwa.
- Safari, A. (2020). *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Penerbit IPB Press.
- Supriyanto, B. (2017). *Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kabupaten Sidoarjo*. 5(1), 1–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.811> DOI
- Susilawati, P., Purwoadmodjo, D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang. *Notarius*, 12(2), 669–678. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29005>
- Syaifudin, M. (2016). *Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Ketersediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kota Kudus (Studi Kasus Perumahan Bumi Rendeng Baru)*. July, 1–23.
- Syukur, A. T., Ady, H., & Palamba, N. (2019). *Model Pelayanan Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Kota Makassar*. 1, 1–13.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Vitriana, A. (2019). The Difficulties in the Handover of Housing Infrastructure, Facility, and Utility in the Greater Bandung Area. *Jurnal Bina Praja*, 21, 149–157. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.149-157>